BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 70 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019, telah ditetapkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen;

b. bahwa Peraturan Bupati Bireuen Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bireuen tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2019 Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 117);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.

5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Inspektorat, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen dan Kecamatan.
7. Majelis Permusyawaratan Ulama selanjutnya disingkat MPU adalah Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen.
8. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama selanjutnya disingkat Sekretariat MPU adalah Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen.
9. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen.
10. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen.
11. Pimpinan adalah Pimpinan MPU dan Kepala Sekretariat pada Sekretariat MPU Kabupaten Bireuen.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Bireuen.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Sekretariat MPU adalah perangkat daerah khusus Aceh yang dibentuk dalam rangka menyelenggarakan urusan keistimewaan Aceh di bidang administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, kepegawaian, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga MPU yang berkedudukan di bawah Bupati.

(2) Sekretariat MPU dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Pimpinan MPU dan secara administratif kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sub Bagian-sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama, terdiri dari:
a. kepala sekretariat;
b. sub bagian keuangan, program dan pelaporan;
c. sub bagian umum, kepegawaian dan aset;
d. sub bagian hukum, persidangan dan hubungan masyarakat; dan
e. kelompok jabatan fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama

Pasal 5

Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, peralatan, perpustakaan, keuangan, ketatalaksanaan, peraturan perundang-undangan, hubungan masyarakat dan persidangan serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga MPU.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program kerja Sekretariat MPU;
b. pelaksanaan program kerja Sekretariat MPU;
c. pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis kepada MPU;
d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, aset dan ketatausahaan dilingkungan Sekretariat MPU;
e. penyiapan penyelenggaraan persidangan dan mebuat risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh MPU;
f. perencanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat MPU;
g. penyusunan rencana, penelaahan dan pengkoordinasian penyiapan kebjakan MPU; dan
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat MPU.

Paragraf 2
Kepala Sekretariat MPU

Pasal 7

Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama mempunyai tugas membantu Bupati memfasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga MPU di bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, peralatan, perpustakaan, keuangan, ketatalaksanaan, peraturan perundang-undangan, hubungan masyarakat dan persidangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja Sekretariat MPU;
b. pelaksanaan program kerja Sekretariat MPU;
c. pelaksanaan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis kepada MPU;
d. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, aset dan ketatausahaan dilingkungan Sekretariat MPU;
e. penyiapan penyelenggaraan persidangan dan mebuat risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh MPU;
f. perencanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat MPU;
g. penyusunan rencana, penelaahan dan pengkoordinasian penyiapan kebjakan MPU; dan
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainya dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi Sekretariat MPU; dan
i. pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan MPU dan Bupati.

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan

Pasal 9

Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang penatausahaan keuangan, verifikasi dokumen keuangan, perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Sekretariat MPU;
b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang penatausahaan keuangan, verifikasi dokumen keuangan, perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Sekretariat MPU;
c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang penatausahaan keuangan, verifikasi dokumen keuangan, perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Sekretariat MPU;
d. melaksanakan tugas dibidang penatausahaan keuangan, verifikasi dokumen keuangan, perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Sekretariat MPU;
e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penatausahaan keuangan, verifikasi dokumen keuangan, perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Sekretariat MPU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang penatausahaan keuangan, verifikasi dokumen keuangan, perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Sekretariat MPU sesuai dengan lingkup tugasnya;
g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat MPU.

Paragraf 4
Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset

Pasal 10

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Sekretariat MPU;
b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Sekretariat MPU;
c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Sekretariat MPU;
d. melaksanakan tugas dibidang tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Sekretariat MPU;
e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Sekretariat MPU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan, kepegawaian, reformasi birokrasi dan pengelolaan aset di lingkungan Sekretariat MPU sesuai dengan lingkup tugasnya;
g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat MPU.

Paragraf 5
Sub Bagian Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat

Pasal 11

Sub Bagian Hukum, Persidangan dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang fasilitasi kegiatan mejelis, pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pembinaan, penyelenggaraan rapat rutin dan rapat kerja majelis, penelaahan dan penyiapan perumusan kebijakan, menganalisis dan menelaah pertimbangan hukum, penyedian bahan perpustakaan, dokumentasi dan publikasi serta kerjasama di lingkungan Sekretariat MPU;
b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang fasilitasi kegiatan mejelis, pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pembinaan, penyelenggaraan rapat rutin dan rapat kerja majelis, penelaahan dan penyiapan perumusan kebijakan, menganalisis dan menelaah pertimbangan hukum, penyedian bahan perpustakaan, dokumentasi dan publikasi serta kerjasama di lingkungan Sekretariat MPU;
c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja dibidang fasilitasi kegiatan mejelis, pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pembinaan, penyelenggaraan rapat rutin dan rapat kerja majelis, penelaahan dan penyiapan perumusan kebijakan, menganalisis dan menelaah pertimbangan hukum, penyedian bahan perpustakaan, dokumentasi dan publikasi serta kerjasama di lingkungan Sekretariat MPU;

d. melaksanakan tugas dibidang fasilitasi kegiatan mejelis, pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pembinaan, penyelenggaraan rapat rutin dan rapat kerja majelis, penelaahan dan penyiapan perumusan kebijakan, menganalisis dan menelaah pertimbangan hukum, penyedian bahan perpustakaan, dokumentasi dan publikasi serta kerjasama di lingkungan Sekretariat MPU;
e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang fasilitasi kegiatan mejelis, pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pembinaan, penyelenggaraan rapat rutin dan rapat kerja majelis, penelaahan dan penyiapan perumusan kebijakan, menganalisis dan menelaah pertimbangan hukum, penyedian bahan perpustakaan, dokumentasi dan publikasi serta kerjasama di lingkungan Sekretariat MPU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang fasilitasi kegiatan mejelis, pelaksanaan pengawasan, pengendalian, pembinaan, penyelenggaraan rapat rutin dan rapat kerja majelis, penelaahan dan penyiapan perumusan kebijakan, menganalisis dan menelaah pertimbangan hukum, penyedian bahan perpustakaan, dokumentasi dan publikasi serta kerjasama di lingkungan Sekretariat MPU sesuai dengan lingkup tugasnya;
g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;dan h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Sekretariat MPU.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten Bireuen sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 14

(1) Kepala Sekretariat MPU dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Kepala Sekretariat MPU merupakan Jabatan Administrator atau eselon III.a.

(2) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat MPU dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 18

Dalam hal Kepala Sekretariat MPU tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala Sekretariat MPU menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sekretariat MPU.

Pasal 19

Atas dasar pertimbangan daya guna dan berhasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

(1) Analisis Jabatan pemangku jabatan struktural dan pelaksana di Lingkungan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Hasil Analisis Beban Kerja di Lingkungan Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Kelas Jabatan pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama diatur dalam Peraturan Bupati.

(4) Kelas Jabatan dan pemangku jabatan pada Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 31 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Bupati Bireuen Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Lembaga Keistimewaan Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 308), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 17 Desember 2019

BUPATI BIREUEN,

dto

SAIFANNUR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 17 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

dto

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019 NOMOR 482


MENGESAHKAN
Salinan / Foto Copy Sesuai dengan Aslinya
Bireuen, Tgl.
Kepala Bagian Hukum
Setdakab Bireuen
SETDA
ARMIA, SH
NIP. 19730901 200604 1 004
BIREUEN